



# Analisis Peran UMKM dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Sumatera Utara Tahun 2020-2024

Disti Aulia Putri<sup>1</sup>, Dini Anggraini<sup>2</sup>, Nirwana Sari<sup>3</sup>, Rifqah Harahap<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Business Management Indonesia Medan

E-mail : [distiaulia126@gmail.com](mailto:distiaulia126@gmail.com)<sup>1</sup>, [20dinianggraini05@gmail.com](mailto:20dinianggraini05@gmail.com)<sup>2</sup>, [irwanasari916@gmail.com](mailto:irwanasari916@gmail.com)<sup>3</sup>, [rifqah412hrp@gmail.com](mailto:rifqah412hrp@gmail.com)<sup>4</sup>

## Article Info

### Article history:

Received July 09, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 21, 2025

### Keywords:

MSMEs, Unemployment, Poverty, Community Welfare, North Sumatra.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in addressing unemployment and poverty in North Sumatra Province during the 2020–2024 period. Unemployment and poverty remain major obstacles to improving community welfare, particularly in regions with uneven development. This research employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on various sources such as academic journals, official reports, and policy documents. The findings indicate that the growth of MSMEs has made a significant contribution to the reduction of unemployment and poverty in North Sumatra. A sharp increase in the number of MSMEs in 2021 coincided with a steady decline in unemployment and poverty rates through 2024. However, the stagnation in MSME growth since 2022 suggests structural challenges in the sector's development. Therefore, more adaptive and sustainable policies are needed to strengthen the role of MSMEs as a key driver of local economic development and community welfare improvement.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## Article Info

### Article history:

Received July 09, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 21, 2025

### Keywords:

UMKM, Pengangguran, Kemiskinan, Kesejahteraan Masyarakat, Sumatera Utara.

## ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2024. Permasalahan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi hambatan utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah dengan ketimpangan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review), yang memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sumatera Utara. Peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2021 terbukti beriringan dengan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan hingga tahun 2024. Namun, stagnasi jumlah UMKM sejak tahun 2022 menunjukkan adanya hambatan struktural dalam pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

***Corresponding Author:***

Disti Aulia Putri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Business Management Indonesia Medan

[distiaulia126@gmail.com](mailto:distiaulia126@gmail.com)**Pendahuluan**

Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini belum merata. Ketimpangan ekonomi masih terasa, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pendapatan yang layak, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang memadai. Sayangnya, banyak wilayah di Sumatera Utara yang belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek-aspek tersebut, sehingga kualitas hidup masyarakat masih berada pada tingkat yang relatif rendah.

Salah satu penyebab utama rendahnya kesejahteraan adalah tingginya tingkat pengangguran yang belum tertangani secara optimal. Bappenas (2020) menyebutkan bahwa pengangguran sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Kondisi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, tidak hanya penghasilannya yang terputus, tetapi juga peluang untuk memperbaiki kualitas hidupnya menjadi sangat terbatas. Selain pengangguran, kemiskinan juga menjadi persoalan krusial yang turut menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. UNDP (2021) menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan layak. Di Sumatera Utara, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi telah dijalankan, namun belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua masalah utama yang saling berkaitan dalam pembangunan daerah. Tingginya angka pengangguran sering disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja dan keterbatasan keterampilan tenaga kerja. Sementara itu, kemiskinan muncul karena rendahnya pendapatan, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta minimnya kesempatan berusaha. Ketika seseorang menganggur, ia kehilangan sumber penghasilan, sehingga berisiko mengalami kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga membuat seseorang sulit mengakses peluang kerja atau modal untuk berusaha. Ketimpangan pembangunan antarwilayah serta belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat turut memperparah kondisi ini, menjadikan pengangguran dan kemiskinan sebagai hambatan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipandang sebagai salah satu solusi strategis. OECD (2017) menegaskan bahwa UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Sumatera Utara, jumlah UMKM tercatat tetap di angka 1.166.918 unit sepanjang 2022–2024, mencerminkan potensi besar dalam penguatan ekonomi lokal. Namun, kontribusi UMKM masih belum optimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan adopsi teknologi (Lestari & Wibowo, 2019). Oleh



karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai peran UMKM dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Utara selama periode 2020–2024. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

## **Kajian Teoritis**

### **1. Pengangguran**

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan terkait perekonomian suatu Negara yang dari dulu sudah ada, hampir semua negara didunia ini memiliki masalah pengangguran, bahkan sekalipun negara maju juga terkena masalah terkait pengangguran (Nano Prawoto, 2019). Kondisi seseorang ataupun penduduk berusia 15-64 tahun yang sudah termasuk kedalam angkatan kerja dan hendak mendapat pekerjaan tetapi pekerjaan yang dicari masih belum didapat disebut pengangguran (Purba et al., 2022).

Peneliti menyimpulkan bahwa pengangguran bukan sekadar persoalan individu yang tidak memiliki pekerjaan, melainkan mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pendapatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

#### **a) Faktor yang mempengaruhi Pengangguran**

Pengangguran merupakan permasalahan ekonomi yang bersifat kompleks dan multidimensional, dengan implikasi signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran umumnya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari aspek struktural, sosial, maupun ekonomi. Dalam konteks regional, seperti di Provinsi Sumatera Utara, terdapat sejumlah determinan yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran. salah satu faktor utama adalah ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Sebagaimana diungkapkan oleh Sukirno (2016), wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam menciptakan peluang kerja yang memadai. Di Sumatera Utara, masih terdapat sejumlah daerah yang belum mengalami perkembangan sektor ekonomi secara signifikan, sehingga kemampuan wilayah tersebut dalam menciptakan lapangan kerja juga masih terbatas.

#### **b) Indikator Pengangguran**

Indikator Pengangguran badan pusat statistic (BPS 2015):

1. Tingkat pengangguran terbuka; persentase jumlah penganggur terhadap jumlah Angkatan kerja
2. Rasio kesempatan kerja: perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah Angkatan kerja
3. Durasi pengangguran: lama waktu seseorang menganggur sebelum mendapatkan pekerjaan

### **2. Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan seseorang maupun sekelompok orang dalam mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Menurut Suryawati (2003), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari pendapatan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Hilmi et al. (2022), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dalam



memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi per orang per bulan. Penduduk dikategorikan sebagai miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti berpendapat bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur melalui tingkat konsumsi dan pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat miskin dan merumuskan strategi penanggulangan yang tepat.

#### **a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan**

Permasalahan kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor utama adalah tingginya tingkat pengangguran yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, rendahnya upah yang diterima pekerja sering kali tidak mencukupi kebutuhan dasar hidup, sehingga mendorong individu tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Kualitas hidup yang rendah juga turut memperburuk kondisi tersebut, mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan layak. Madanipour et al. (2015) menyebutkan bahwa kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya keuangan, kondisi kesehatan yang buruk, minimnya akses terhadap layanan dasar, serta kerentanan terhadap bencana seperti kelaparan dan kekeringan yang dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

#### **b. Indikator Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), kemiskinan dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang mencerminkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama, individu atau rumah tangga dikategorikan miskin apabila memiliki pendapatan per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Kedua, tingkat konsumsi kalori dan protein per kapita per hari berada di bawah standar minimum yang ditetapkan untuk mempertahankan kehidupan yang sehat dan produktif. Selanjutnya, indikator ketiga mencakup rendahnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi pengeluaran untuk kebutuhan pokok, baik yang bersifat pangan maupun non-pangan. Keempat, terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi penanda penting dalam mengukur dimensi kemiskinan non-material. Terakhir, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, baik dari segi konstruksi maupun fasilitas dasar yang tersedia, juga menjadi indikator yang mencerminkan kerentanan ekonomi dan sosial suatu rumah tangga.

### **3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM menurut beberapa instansi: Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,



atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Sementara itu, Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014) Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti berpendapat bahwa UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha, tanpa menjadi bagian atau cabang dari perusahaan besar. Skala usaha ini dikategorikan ke dalam usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan ukuran kekayaan bersih dan omzet penjualan tahunan. Kriteria tersebut digunakan sebagai acuan dalam memahami posisi dan peran UMKM dalam struktur perekonomian, terutama dalam konteks lokal dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat setempat.

#### **a. Kriteria UMKM**

Kriteria UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) hingga (4), yang mengelompokkan usaha menjadi mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta dan penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, dan penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar. Sementara itu, usaha menengah memiliki kekayaan bersih di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar, atau penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar. Kriteria nominal ini dapat berubah mengikuti dinamika ekonomi dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

#### **b. Peran UMKM**

UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja produktif. Keberadaannya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga turut mendorong pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM membuka ruang bagi individu yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan usaha sendiri, tidak hanya bergantung menjadi pekerja, tetapi juga menjadi wirausahawan. Sebagai bagian penting dalam struktur perekonomian nasional, UMKM berkontribusi dalam mendistribusikan hasil pembangunan dan menunjukkan ketahanan yang tinggi terhadap krisis ekonomi. Perputaran transaksi yang cepat menjadikan UMKM sebagai sektor unggulan yang layak untuk terus dikembangkan. Oleh karena itu, keberlanjutan UMKM perlu didukung melalui akses permodalan, kemudahan perizinan, pendampingan, serta pelatihan yang bersifat memberdayakan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya UMKM sebagai fondasi ekonomi bangsa juga perlu ditumbuhkan secara berkelanjutan.



## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Menurut Zed (2004), studi pustaka dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu menyiapkan alat penelitian, menyusun bibliografi kerja, mengatur waktu, serta membaca dan mencatat bahan bacaan secara sistematis.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang membahas peran UMKM dalam perekonomian, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Literatur yang dikaji mencakup teori tentang UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal, kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM, serta studi empiris mengenai dampak UMKM terhadap pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Krippendorff (2004) menyatakan bahwa analisis isi merupakan teknik yang sistematis untuk menarik kesimpulan yang dapat diuji dan diulang dari berbagai bentuk teks. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti kebijakan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan sintesis tematik guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kontribusi UMKM terhadap pembangunan sosial ekonomi di Sumatera Utara selama periode 2020-2024.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Di Sumatera Utara (2020–2024)

Berikut ini disajikan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun terakhir:

**Tabel 1.** Data Pengangguran Sumatera Utara 2020-2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2020	6,91
2021	6,33
2022	6,16
2023	5,89
2024	5,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatra Utara, 2025

Berdasarkan Tabel 1. tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 6,91% pada 2020 menjadi 5,60% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan membaiknya rasio kesempatan kerja, sebagaimana dijelaskan oleh BPS (2015). Perbaikan ini diduga kuat dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam sektor informal dan UMKM, yang menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar (Kemenaker, 2023).



## Analisis Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara (2020–2024)

Data berikut menggambarkan perkembangan persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2024:

**Tabel 2.** Data Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (2020–2024)

Tahun	Kemiskinan(%)
2020	7,99
2021	7,60
2022	7,40
2023	7,25
2024	7,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatra Utara, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan secara perlahan membaik, dari 7,99% pada tahun 2020 menjadi 7,19% pada tahun 2024. Meskipun laju penurunannya tidak terlalu besar, tren tersebut menunjukkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemungkinan didukung oleh upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, termasuk peran dari sektor UMKM.

## Perkembangan Jumlah UMKM di Sumatera Utara (2020-2024)

Berikut disajikan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Utara selama lima tahun terakhir:

**Tabel 3.** Data UMKM Sumatera Utara 2020-2024

Tahun	Jumlah UMKM
2020	± 960.000
2021	± 1.712.091
2022	± 1.166.918
2023	± 1.166.918
2024	± 1.166.918

Sumber: Antara News. (2023). Pemprov Sumut targetkan 20 persen UMKM go digital pada 2024.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa jumlah UMKM di Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021, yakni mencapai ±1.712.091 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar ±960.000 unit. Peningkatan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan pemulihan ekonomi serta dorongan pemerintah terhadap kewirausahaan masyarakat selama masa pandemi. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah UMKM tercatat tidak mengalami perubahan, yaitu tetap berada pada angka ±1.166.918 unit. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pengembangan UMKM, seperti terbatasnya akses permodalan, pasar, atau pemanfaatan teknologi digital.



Berdasarkan data yang telah disajikan dalam tiga tabel, terlihat adanya keterkaitan yang signifikan antara pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tren penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2024. Peningkatan paling mencolok terjadi pada tahun 2021, di mana jumlah UMKM melonjak dari sekitar  $\pm 960.000$  unit menjadi  $\pm 1.712.091$  unit. Kenaikan ini diduga kuat sebagai dampak dari berbagai program pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang diluncurkan pemerintah, seperti bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta program digitalisasi UMKM.

Seiring dengan peningkatan jumlah UMKM tersebut, tingkat pengangguran di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 6,91% pada tahun 2020 menjadi 6,33% pada 2021, dan terus menurun hingga 5,60% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan UMKM berkontribusi dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor informal dan usaha mandiri yang menyerap tenaga kerja dalam skala besar, termasuk mereka yang sebelumnya menganggur. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan dari 7,99% pada tahun 2020 menjadi 7,19% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam membuka lapangan kerja, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun demikian, mulai tahun 2022 hingga 2024, jumlah UMKM mengalami stagnasi dan tetap berada di angka  $\pm 1.166.918$  unit. Stagnasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan UMKM, seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, keterbatasan pasar, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menjadi indikator perlunya intervensi dan dukungan kebijakan yang lebih terarah untuk menjaga peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

Jika dibandingkan dengan data nasional, tren penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pola yang sejalan dengan kondisi Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), tingkat pengangguran terbuka nasional mengalami penurunan dari 7,07% pada tahun 2020 menjadi 5,32% pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan nasional juga menurun dari 10,19% menjadi 9,30% dalam kurun waktu yang sama. Data ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara tidak hanya mengikuti arah pemulihan ekonomi nasional, tetapi juga mencatat capaian yang relatif lebih baik karena angka pengangguran dan kemiskinannya berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini dapat dipandang sebagai indikator positif dalam upaya pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, temuan ini juga didukung oleh berbagai penelitian ilmiah. Misalnya, studi oleh Magister et al. (2020) di Kota Palopo menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Thesia dan Karmini (2022) di Provinsi Bali, yang mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah UMKM dan pendapatan per kapita memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini memperkuat argumen bahwa keberadaan UMKM secara umum berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, stagnasi jumlah UMKM di Sumatera Utara pada periode 2022 hingga 2024 merupakan hal yang patut menjadi perhatian. Penelitian oleh Munawara et al. (2025) di Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa stagnasi dan kemunduran UMKM sering kali disebabkan oleh minimnya akses terhadap pembiayaan, keterbatasan keterampilan digital, serta belum optimalnya dukungan pemasaran. Ini menunjukkan bahwa untuk menjaga kontribusi UMKM dalam penurunan pengangguran dan kemiskinan, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.



## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Meskipun berbagai program pemerintah telah dijalankan, kedua masalah tersebut tetap menunjukkan angka yang signifikan, meski cenderung mengalami penurunan selama periode 2020–2024.

Salah satu faktor yang berperan dalam perbaikan tersebut adalah pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM terbukti memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Data menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM, khususnya pada tahun 2021, beriringan dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara bertahap hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat, terutama di tengah pemulihan pascapandemi.

Namun demikian, jumlah UMKM sejak tahun 2022 menunjukkan bahwa peran UMKM belum dioptimalkan secara maksimal. Berbagai hambatan seperti keterbatasan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi digital, serta rendahnya kualitas SDM menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, antara lain berupa penguatan ekosistem UMKM, perluasan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas digital bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan penguatan peran UMKM melalui dukungan kebijakan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan pengangguran dan kemiskinan di Sumatera Utara dapat terus ditekan, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Aufar, H. A. (2014). *Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Globalisasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Badan pusat Statistik. (2015). *Profil kemiskinan di Indonesia maret 2015*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Agustus 2015*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2020). *Laporan Pembangunan Nasional 2020*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Hilmi, Marumu, M. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology* (2nd ed.). London: Sage Publications.



- Lestari, R., & Wibowo, A. (2019). Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 25–33.
- Madanipour A, M Shucksmith, dan H Talbot. 2015. *Concepts of poverty and social exclusion in Europa. Local Economy*, 30(7), 721-741.
- Magister, D. R., Semmaila, M., & Abdullah, A. (2020). Pengaruh UMKM Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Palopo. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 145–157.
- Munawara, S., Rohmah, N., & Mashudi, M. (2025). Strategi Pengembangan UMKM di Kabupaten Bangkalan: Analisis Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 45–57.
- OECD. (2017). *Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy*. Paris: OECD Publishing.
- Prawoto, N. (2019). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 62–74. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.336>
- Sukirno, S. (2016). *Pengantar teori makroekonomi* (Edisi ke-3). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryawati. 2003. *Teori ekonomi mikro*. UPP, AMP YKPNA: Yokyakarta. Sutisna. 2012. *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. PTRemaja Rusda Karya: Bandung.
- Thesia, N. P., & Karmini, N. W. (2022). Pengaruh UMKM, Pendapatan Per Kapita, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(1), 1–15.
- UNDP. (2021). *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: United Nations Development Programme.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.